

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG
PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN
ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan usulan perubahan pejabat/pegawai karena masa purna tugas Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara per 31 Mei 2018, sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018 TENTANG PETUGAS PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Lampiran dalam Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tentang Petugas Pengelola Persediaan Unit Kerja Eselon II Tahun Anggaran 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 17 Juli 2018

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG PETUGAS PENGELOLA
PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II
TAHUN ANGGARAN 2018 DI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 42 TAHUN 2018

TANGGAL : 17 Juli 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM PETUGAS
PENGELOLA PERSEDIAAN UNIT KERJA ESELON II TAHUN ANGGARAN 2018
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama | Unit Kerja Eselon II | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|-----------------------------|---|-----------------|
| 1 | Penanggung Jawab | Dwi Wahyuni Kartianingsih | Biro Umum dan Keuangan | 450.000 |
| 2 | Ketua | Satriyo Wibowo | Biro Umum dan Keuangan | 400.000 |
| 3 | Sekretaris | Kurnia Sari | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| 4 | Anggota | 1. Intan Dana Lestari | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 2. Angga Fariz Prayoga | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 3. Nur Hartoyo | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 4. Rati Karimah | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 5. Muhammad Irsyan Halomoan | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 6. Adi Irawan | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 7. Setiawan Rahandi Sabri | Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata laksana | 300.000 |
| | | 8. Andi Setya Nugraha | Biro Umum dan Keuangan | 300.000 |
| | | 9. Dede Agustina Muhajirin | Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian | 300.000 |
| | | 10. Eva Sinaga | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum | 300.000 |

| No. | Kedudukan dalam Tim | Nama | Unit Kerja Eselon II | Honorarium (Rp) |
|-----|---------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | | 11. Oktrita Purwantari Rahayu | Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus | 300.000 |
| | | 12. Syukri | Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional | 300.000 |
| | | 13. Winny Adlina Pratomo | Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan | 300.000 |
| | | 14. Rr.Ajeng Kusharyeni Pratiwi | Direktorat Pengembangan Sistem Katalog | 300.000 |
| | | 15. Vialita Octaviani | Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik | 300.000 |
| | | 16. Kemala De Kristie | Direktorat Pengembangan Profesi | 300.000 |
| | | 17. Juniarty Erika M. S. | Pusdiklat | 300.000 |
| | | 18. Manshur Riadli | Direktorat Sertifikasi Profesi | 300.000 |
| | | 19. Ali Masrochan | Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I | 300.000 |
| | | 20. Hendra Damendra Numberi | Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II | 300.000 |
| | | 21. Inamawati Mastuti Dewi | Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum | 300.000 |
| | | 22. Bretty Rachayu Budyanty | Inspektorat | 300.000 |

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA